0 I 8 ~ C pta milik

Ka

Cinta Dilindungi Undang-Undang

TUGAS AKHIR

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN S DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Sn

Diayukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

HASPRILLIANTI MONICA NIM. 01776201153





PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

ang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: ngutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: -

0

I

8 ~ C

BIG

milik UIN

S Sn

Ka

N

9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA HASPRILLIANTI MONICA

NIM 01776201153

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

JUDUL KEPATUHAN **PAJAK** DALAM **WAJIB** MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR

TANGGAL UJIAN 20 MEI 2020

Pekanbaru, 8 Mei 2020

Disetajui Oleh:

200701 1 025 NIP. 196904

MENGETAHUI

DEKAN

NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PROGRAM STUDI

Sahwitri Wriandani, SE., M.Si NIP. 19820806 200604 2 002

Dr. Drs. H. Muh. Said, HM., M.Ag., MM

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Z

9

I a ~ C

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

P NAMA HASPRILLIANTI MONICA

NIM 01776201153

EAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN S

FUDUL KEPATUHAN **WAJIB PAJAK** DALAM Ka

MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-

P2) **PADA** BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TANGGAL UJIAN 20 MEI 2020

> Pekanbaru, 17 Juni 2020 Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

Fakhrurrozi, SE., MM NIP. 19670725 200003 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I

State Islamic University of Sultan Henni Inddrayani,
SNIP. 19700802 199

NIP. 19700802 199803 2 003

Kasim Riau

PENGUJI II

NIK. 130 717 060



) Hak c

CZ

S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ABSTRAK

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

OLEH:

HASPRILLIANTI MONICA 01776201153

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Indrairi Hiilir tidak pernah terealisasi dengan baik bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya maka dari itu penulis ingin mengetahui mengapa terjadi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kabupaten Indragiri Hilir. Adapun data yang digunakan untuk penulisan ini data primer yang bersumber langsung dari tempat penelitian dan data sekunder yang bersumber dari cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yaitu dari buku-buku, serta dokumen dan literatur. Dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sedangkan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak teraji karena kurangnya sosialisasi tentang perpajakan, sikap peduli wajib pajak akan kewajiban perpajakan masih rendah, Dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa yang ada di kabupaten Indragiri Hilir, dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sebesar 2% dan maksimal 48%.

Kata Kunci: pajak bumi dan bangunan, ketidakpatuhan, upaya peningkatan ketidakpatuhan pembayaran pajak

UIN SUSKA RIAU

slamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

i

I

ak

CIP

ta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

KATA PENGANTAR

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Tahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "KEPATUHAN WAJIB PAJAK BALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR" ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Hastoni, S.Sos dan Ibunda Indesmala, S.Pd yang tidak pernah Lelah memberikan semangat kepada penulis selalu memberi motivasi yang besar agar penulis bisa mecapai cita-cita, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis hingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Kepada kakak tersayang Hasmaria Debyani dan Hesthy Meilani yang selama ini selalu memberi semangat, motivasi, dan mendoakan keberhasilan penulis.

Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



I

9

CIP

Sis

Sn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

7. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan dalam penulisan Tugas akhir ini.

Para Dosen Jurusan Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.

Kepada segenap jajaran pegawai Kantor di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian demi menyelesaikan tugas akhir ini

10. Teman-teman seperjuangan khususnya D3 Administrasi perpajakan kelas C serta sahabat-sahabat penulis, Helen Fitriasa, Nabila Fadhila Haya, Fitri Wardani, Tina Qadarsih, Lady Gita Noviantri, Umi Faridatul, Nadya Afrila, Misi Zulia, Meytri Adinda, Sevty Intan Dwiva, Endang Fitriyani, Recha Nelza, Yelly Sarlen, Ratna Dewi, Eggy Tri, Rifka Adila, Mutiara Hatta, Rio Putra, Vira Audina, Juleha yang telah memberi semangat dan motivasi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

11. Saudara Nova Syafitri yang telah membantu penulis dalam penyiapan berkas, selalu memberi semangat untuk penulis dan untuk Rindra Ismail Dalimunte waktu dan memberikan dukungan untuk telah meluangkan menyelesaikan Tugas Akhir ini sampai selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2020

Hasprillianti Monica NIM. 01776201153

0

DAFTAR ISI

H a K C EMBAR PERSETUJUAN

LEMBA	R PEN	GESAHAN	
ABSSTR	AK		i
		NTAR	ii
DA FTAR	R ISI		iv
D AFTAF	R TAB	EL	vi
D AFTAF	R GAM	1BAR	vii
BAB I	PEN	IDAHULUAN	
Z.	I.1	Latar Belakang Masalah	1
au	I.2	Rumusan Masalah	3
	I.3	Tujuan Penulisan	4
	I.4	Manfaat Penulisan	4
	I.5	Metode Penulisan	4
	I.6	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAN	MBARAN UMUM INSTANSI	
	II.1	Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	
		Indragiri Hilir	7
(0)	II.2	Struktur Organisasi	8
State	II.3	Kepegawaian	12
BAB III	TIN.	JAUAN TEORI DAN PRAKTIK	
slamic	III.1	Tinjauan Teori	15
nic		III.1.1 Pengertian pajak	15
Un		III.1.2 Fungsi Pajak	16
ive		III.1.3 Sistem pemungutan pajak	18
rsi		III.1.4 Syarat pemungutan pajak	19
tyc		III.1.5 Tata cara pemungutan pajak	20
of S		III.1.6 Pengelompokan Pajak	21
ult		III.1.7 Prinsip Perpajakan	26
an		III.1.8 Perbedaan pajak dengan jenis pemungutan	
Sya		lainnya	28
University of Sultan Syarif Kasim Ria			
Ka		iv	
sim			
Ri			
2			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

	I
D	2
ila	5
ar	ota
g	O
ğ	≣
ğue	현
tug	ng
9	=
se	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
ba	ar
gia	ē.
UE	5
at	de
au	ĵ,
Se	_
Ë	
루	
7	
ary	
a	
Ξ	
S	
⊒.	
tar	
ğ	
JI E	
ЭE	
ನ	
1nc	
n	
훘	
UE	
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan su 	
n	
ne	
Ŋ	
eb	
T+	
â	
S	

III.1.9	Kepatuhan membayar pajak	29
III.1.10	Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan	31
III.1.11	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	31
III.1.12	Azas dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi	
	dan Bangunan	32
III.1.13	Objek, Subjek dan Klasifikasi Objek	
	Pajak Bumi dan Bangunan	33
III.1.14	Tarif pajak	35
III.1.15	Dasar pengenaan pajak	35
III.1.16	Penentuan nilai jual objek pajak (NJOP)	
	dan Pendekatan penentuan NJO	36
III.1.17	Nilai jual pajak tidak kena pajak	37
III.1.18	Dasar perhitungan PBB	37
III.1.19	Cara menghitung pajak	38
III.1.20	Tahun pajak, sa <mark>at, dan temp</mark> at yang	
	menentukan pajak terutang	38
III.1.21	Surat ketetapan pajak	38
III.1.22	Tatacara pembayaran	39
III.1.23	Peraturan daerah kabupaten Indragairi Hilir	
	Nomor 1 Tahun 2019 tentang pajak daerah.	40
III.1.24	Upaya pemerintah dalam meningkatakan	
	kepatuhan wajib pajak	42
III.1.25	Pajak Menurut Islam	42
III.2 Tinjaua	n Praktik	45
III.2.1	Ketidakpatuhan wajib pajak dalam	
	Membayar PBB di kabupaten Indragiri	A T
	Hilir	45
III.2.2	Upaya yang dilakukan untuk	
	meningkatkan kepatuhan	
	wajib pajak dalam membayar PBB	47

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



0

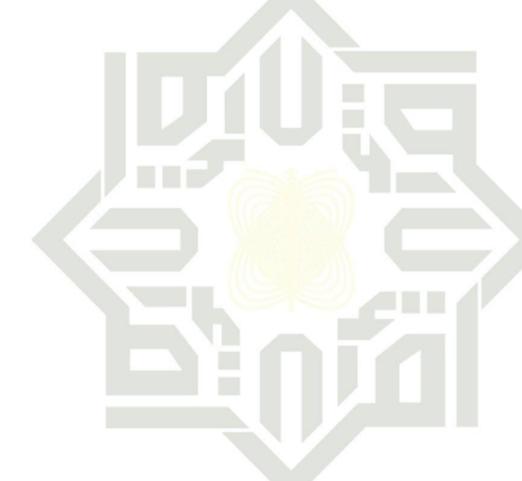
Riau

	×
ilaranc	Cipta
menauti	Jilindung
Dilarang mengutip sebagian	ak Cipta Dilindungi Undang-Un

Hak c 5 milik atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Sus Ka

III.2.3 Perbandingan Antar Tinjauan Teori dan Praktik 48 BAB IV **PENUTUP** IV.1 Kesimpulan 49 IV.2 49

DAFTAR PUSTAKA Z



SUSKA RIAL

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



0 Hak cip

Riau

	*
ilaranç	Cipta
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tu	ak Cipta Dilindungi Undang-Undang
tip se	gi Un
bagian	dang-Ur
atau	ndang
seluruh	_
karya	
=	

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table I.1	Daftar Ketetapan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan	
3.	Bangunan Tahun 2017-2019 di Kabupaten Indragiri Hilir	2
Tabel II.1	Daftar UPTD Kabupaten Indragiri Hilir	11
Fabel II.2	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	
Z	Indragiri Hilir Berdasarkan Jabatan	12
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan	
ka	PTT/Honorer	13

SUSKA RIA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria



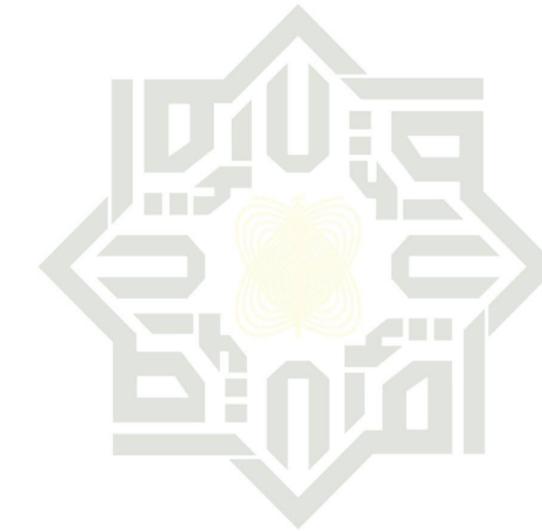
0 Hak cip

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Oragnisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir

10



SUSKA RIAU

milik UIN Sus

Ka Z iau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

0 I a ~ cipta _ Z S

S Ka

N

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

BAB I

PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Negara berkembang memerlukan pembangunan di segala bidang untuk memenuhi kewajiban terhadap rakyat Indonesia yaitu dengan cara memenuhi sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintah. Untuk memenuhi sarana dan prasarana pembangunan diperlukan upaya yang optimal dari berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara (Mustikawati, 2017). Ada pun sumber pendapatan negara yang terbesar salah satunya dari pajak.

Adapun pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara dengan sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan negara untuk kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat (Undang -Undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Adapun salah satu pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan menurut perda inhil nomor 1 tahun 2019 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

0

I

8

cip

la a

milik

CZ

Sn

9

State

lamic

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang sedang berkembang memerlukan pembangunan daerah dan salah satu sumber pembangunan o tersebut diperoleh dari pajak bumi dan bangunan agar pembangunan dapat berjalan lancar maka dari itu wajib pajak diharapkan patuh terhadap D pembayaran pajak bumi dan bangunan agar mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak bersumber dari kesadaran wajib pajak atas kewajiban untuk membayar pajak. Akan tetapi kesadaran wajib pajak atas kewajiban membayar pajak masih kurang patuh dan ada beberapa wajib pajak yang melalaikan sehingga target yang ditetapkan belum terealisasikan dengan baik.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diketahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan untuk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

gunan
- A T
ersentase Rupiah
Kupian
21,1%
18,6%
15,6%

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



0

I

ak

cip

la a

3

S

Sn

N

a

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Dari tabel I.1 dapat dilihat setiap tahunya terjadi peningkatan dalam target pencetakan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Selama tahun 2017-2019 tidak pernah terealisasi dengan baik. Di mana target yang terealisasi hanya maksimal pada tahun 2017 sebesar 21,1%. Sedangkan untuk tahun 2018-2019 presentasi mengalami penurunan setiap tahunya. Sehingga penerimaan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir belum pernah tercapai dengan baik padahal kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk perkembangan daerah.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, mendasari penulisan untuk melakukan penulisan tentang "KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"

Rumusan masalah

- 1. Mengapa terjadi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Indragiri Hilir?
- 2. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik

Sus

0

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan untuk:

- Mengetahui mengapa terjadi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten Indragiri Hilir
- 2. Mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini terbagi menjadi:

- Bagi penulis manfaat penulisan ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
- 2. Bagi pihak lain semoga penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan tentang ilmu perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan.

Metode Penulisan

Adapun penulisan ini menggunakan jenis penulisan kuantitatif.

I.5.1 Lokasi Penulisan

Penulisan dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hilir, yang beralamat Jl. Akasia No.02, Tembilahan, Riau, Indonesia 29212

I.5.2 Waktu Penulisan

Penulisan ini dilakukan selama 4 bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan April 2020

🛱ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

0 I 8 ~ cipta milik CIZ Sus ka N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

I.5.3 Jenis data

Adapun jenis data yang di yang diambil dalam penulisan ini:

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono: 2012, hal 139)

Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen dan literatur.

I.5.4 Metode pengumpulan data

Penulis melakukan penumpulan data dengan menggunakan metode:

1. Metode Wawancara.

Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan Kabid Pajak Bumi dan Bangunan untuk mendapatkan informasi tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Metode observasi

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang terjadi.

I.5.5 Analisis data

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

1. Penulis melakukan penganalisisan data dengan menggunakan penjelasan data yang bersifat deskriptif yaitu metode-metode yang

0 I 8 ~ cipta milik CIN S **L**66 Ka

> N 8

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

- berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna.
- Data diperoleh berupa dokumen, kemudian data tersebut penulis olah sesuai dengan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan.

Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan dalam masing-masing bab yang dapat diuraikan seperti berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, metode penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan

GAMBARAN UMUM LOKASI PENULISAN BAB II

Bab ini membahas tentang sejarah singkat kantor, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas sub bagian.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini membahas tentang pengertian pajak, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

~ cipta

0

I

a

3

Z S

Sn

ka

N

8 \subseteq

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

H.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten/daerah tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penulisan, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Tembilahan resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu pemerintah daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pemungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih di bawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No. 1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri. otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 8 cipta milik ka N

a

State

amic

University of Sultan Syarif Kasim Ria

I ~ Sus

Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fa'ad.

Setelah lebih kurang 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Centre tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak Bumi dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centre tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, Sekaligus diresmikannya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (DISPENDA). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berganti nama jadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

II.2 Struktur Organisasi

- Kepala Badan
- Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah cipta

0

I

8 ~

milik

⊂ N

Sus

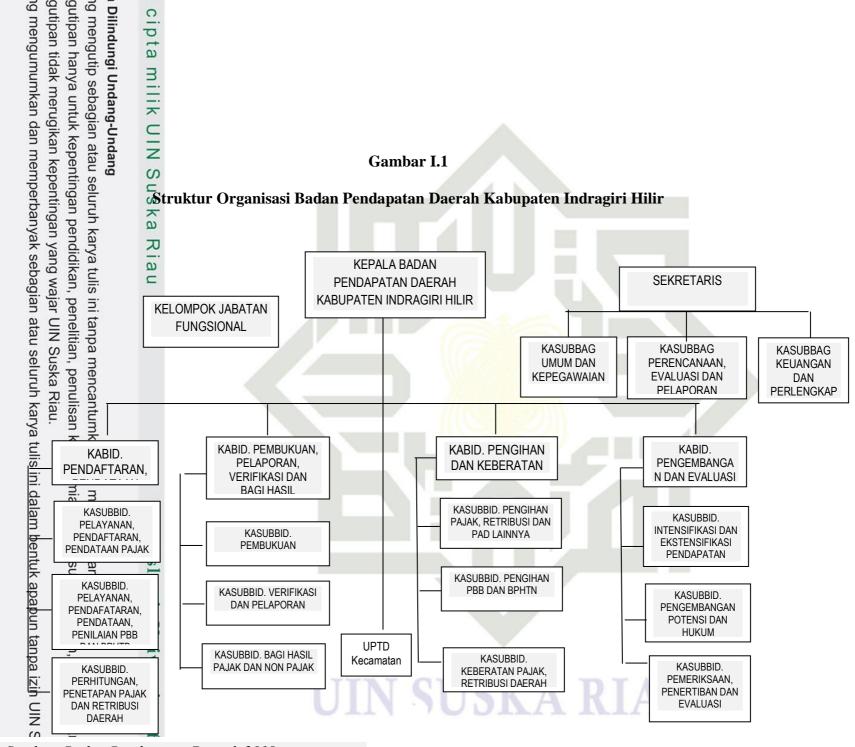
ka

N

a

- Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
 - Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB;
 - Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil terdiri dari:
 - Sub Bidang Pembukuan
 - Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan.
 - Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak. 3.
- Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
 - Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya.
 - Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
 - Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya.
- Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
 - Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum. 2.
 - Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi.
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPTD Kecamatan.





ılta

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I a ~ CIP t a milik Sus Ka N a

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas mempunyai UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan yang berkantor tersebar di 12 (dua belas kecamatan). Adapun UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan, terdiri dari:

Tabel II.1 Daftar UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Kabupaten **Indragiri Hilir**

NO	UPTD	KELAS	WILAYAH KERJA		
1.	UPTD Kecamatan Tembilahan	В	Kecamatan tembilahan		
2.	UPTD kecamatan tembilahan	В	Kecamatan Tembilahan		
	hulu		Hulu		
3.	UPTD Kecamatan Gaung Anak	A	a. kecamatan Gaung Anak		
	Serka		Serka		
		111	b. Kecamtan Batang		
		All 1889	Tuaka Tuaka		
4.	UPTD Tanah Merah	A	Kecamatan Tanah Merah		
5.	UPTD Kecamatan Kuala	A	a. Kecamatan Kuala		
	Indaragiri	1/// 1//	Indragiri		
			b. Kecamatan Concong		
6.	UPTD Kecamatan Tempuling	A	a. kecamatan Tempuling		
			b. Kecamatan Kempas		
7.	UPTD Kecamatan Reteh	A	a. Kecamatan Reteh		
			b. Kecamatan Sungai		
			Batang		
8.	UPTD Kecamatan Keritang	A	Kecamatan Keritang		
9.	UPTD Kecamatan kemuning	В	Kecamatan Kemuning		
10.	UPTD KECAMATAN Mandah	В	Kecamatan Mandah		
11	UPTD kecamatan Pelangiran	В	Kecamatan Pelangiran		
12.	UPTD Kecamatan Pulau	В	Kecamatan Pulau Burung		
	Burung				

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria Keterangan kelas A dan B pada daftar UPTD Kabupaten Indragiri Hilir

- A. Kelas A wilayah kerja lebih luas, dan lebih banyak Wajib Pajak
- B. Kelas B wilayah kerja lebih sedikit dan wajib pajak sedikit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

Sus

ka

Z

a

W.3 Kepegawaian.

Untuk n

melaksanakan p

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang di dalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme di kalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga di dalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Tabel II.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	FORMASI	TERISI	KURANG	JENIS KELAMIN	
NO					LK	PR
1	II/b	1	1	0	1	0
2	III/a	1	1	0	1	0
3	III/b	4	4	0	2	2
4	IV/a	21	20	1	9	11
5	IV/b	8	7		6	
<u> </u>	UMLAH	35	33	2	19	14

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

0 I 8 ~ cipta milik \subset Z Sus Ka

Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan pangkat dan golongan berjumlah 88 orang dan 92 orang PTT/Honorer dengan uraian sebagai berikut: Tabel II.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

dan PTT/Honorer

NO	DANGE AT COLONG AN	TIDAT ATT	JENIS KELAMIN	
	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH	LK	PR
1	Pembina Utama Muda, IV/c	9 1	1	-
2	Pembina Tk.I, IV/b		-	-
3	Pembina, IV/a	5	3	2
4	Penata Tk.I, III/d	19	10	9
5	Penata, III/c	10	5	5
6	Penata Muda Tk.I, III/b	14	6	8
7	Penata Muda, III/a	22	12	10
8	Pengatur Tk.I, II/d	2	1	1
9	Pengatur, II/c	7	6	1
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2	1	11
11	Pengatur Muda, II/a	3	3	
12	Juru Tk. I, I/d	1	1	
13	Juru, I/c	1	1	-
14	Juru Muda Tk. I, I/b	1	1	-
15	Juru Muda, I/a	-	//	-
16	PTT/Honorer	92	55	37
JUM	ILAH	180	105	75

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil dengan jumlah 88 orang, 33 orang di antaranya menduduki jabatan eselon, maka jumlah staf/pelaksana (non eselon) sebanyak ini dirasakan masih kekurangan dalam melaksanakan tugas 55 orang, khususnya dalam pengisian formasi khususnya di beberapa UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kecamatan, di antaranya

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Kemuning belum ada PNS yang di tempatkan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung belum ada Staf/Pelaksana yang berstatus PNS, begitu juga UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandah hanya 1 (satu) orang Staf/Pelaksana yang berstatus PNS itu pun sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, dan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan Hulu juga tidak mempunyai Staf/Pelaksana yang berstatus PNS, sedangkan Jasa Kontrak/PTT sebanyak 92 Orang ditugaskan sebagai Juru Penagih Pajak/Retribusi Daerah/Tenaga Administrasi lainnya, dan 11 Orang ditugaskan sebagai Tenaga Penjaga/Pengamanan Kantor, serta 3 Orang sebagai Petugas Kebersihan Kantor, dan 1 Orang sebagai Tenaga Teknisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Listrik/Elektronik).

UIN SUSKA RIAU

Ha ~ CIP ta

===

Sus

ka

刀

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

BAB IV

PENUTUP

LY.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil tinjauan dan praktik yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat diambil kesimpulan:

- Ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Indragiri Hilir karena kurangnya sosialisasi tentang perpajakan, sikap peduli wajib pajak akan kewajiban perpajakan masih rendah, perbedaan nama wajib pajak maksudnya bukan atas nama wajib pajak sendiri hal ini terjadi pada saat pembelian tanah dan bangunan belum melakukan balik nama, kesulitan masyarakat pedesaan dalam melakukan pembayaran langsung ke bank karena biaya transportasi lebih mahal dari pada pajak terutang, tanah yang dimiliki sudah tidak menghasilkan lagi sehingga wajib pajak tidak ingin membayar pajak bumi dan bangunan.
 - Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa yang ada di kabupaten Indragiri Hilir, melakukan verifikasi dan validasi data wajib pajak contohnya untuk wajib pajak yang belum balik nama di minta untuk mengurus balik nama dan melakukan verifikasi dengan yang benar, mendatangi langsung maksudnya untuk pedesaan yang sulit melakukan pembayaran langsung ke bank maka di pungut dengan cara datang menjemput untuk bantu setor ke bank dan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



0 Hak cipta 3 CZ

Sus

ka

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk bukti pembayaran akan dikirim Kembali melalui kepala desa atau UPT (Unit Pelaksana Teknis), dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sebesar 2% dan maksimal 48%.

IV.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang tertentu berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan lagi sosialisasi arti pentingnya membayar pajak supaya masyarakat sadar akan pentingnya membayarkan pajak.
- Bapenda tiap tahunnya memberi anggaran untuk penyuluhan ke desa-desa agar meningkatkan pembayar pajak bumi dan bangunan.
- 3. Untuk penulisan selanjutnya, penulis berharap semoga masih banyak ilmu yang di ambil untuk melanjutkan penelitian ini khususnya penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

UIN SUSKA RIA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria



I

ak

cip

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

DAFTAR PUSTAKA

Amrulloh, R. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Subjek.

Budiarto, A. (2016). *Pedoman praktis membayar pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.

Baerah, P. (2019). Peraturan Daerah Indaragiri Hilir. Inhil.

Daerah, U. d. (2009). UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.

Gusfahmi. (2007). Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Idris, I. F. (2014). Pengantar Perpajakan . Yogyakarta: Andi.

Iqtishadia. (2017). Kepatuhan, AnalisisPajak, Wajib Realisasi, Berdasarkan Pbb, Bangunan.

Lamia, A. A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan the Analysis of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant, Advertising Tax and Street Lighting Levy District. *jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.

LPPA. (2015). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B. Pekanbaru.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan edisi terbaru. Yogyakarta: Andi.

Muljono, D. (2010). Panduan Brevet Pajak. Yogyakarta: Andi.

Mustikawati, N. M. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Murfauzi, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Primandita Fitriandi, Y. A. (2014). *Komplikasi Undang-undang Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat

Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Pattu, N. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pbb Terhadap
Pad Kota Denpasar Tahun 2009-2013. E-Jurnal Akuntasi Universitas
Udayana.

Yarif Kasim Ria

ឪ Islanaic University of Sutan Syarif Kasim Ria



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I

S

ka

N a

Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Ronia, K. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Setiawati, A. D. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis . Yogyakarta: Andi.

Setiawati, A. D. (2014). Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: Andi.

TMbooks. (2013). Perpajakan Esensi dan Aplikasi . Yogyakarta:

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

pagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor Sifat Lampiran

S ㅈ 8

N

B

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

u

: Un.04/F.VII/PP.00.9/123/2020

Pekanbaru, 09 Januari 2020 M 13 Jumadil Awwal 1441 H

Rerihal

Bimbingan Laporan Penelitian

Kepada

Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

: Hasprillianti Monica Nama

NIM : 01776201153 Jurusan : D-III Perpajakan Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan "Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir". Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, NIP. 19620512 198903 1 003





Nomor Life a life ampiran Hal S S

9

N

B

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

u

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Januari 2020 M

13 Jumadil Awwal 1441 H

: Un.04/F.VII/PP.00.9/122/2020

: Biasa

: Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama

: Hasprillianti Monica

NIM.

01776201153 D-III Perpajakan

Jurusan Semester

: VI (Enam)

bermaksud mengadakan Izin Penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan.

H. Muh. Said HM, M.Ag, M NIP. 19620512 198003 1 003

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber





Undang-Undang

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email: dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos: 28126

REKOMENDASI
Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29605 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

sebagian atau seluruh Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VIVPP.00.9/122/2020 Tanggal 9 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

S

S

1. Nama

01776201153 2. NIM / KTP PERPAJAKAN 3. Program Studi

DIII 4. Jenjang

PEKANBARU 5. Alamat

HUBUNGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK 6. Judul Penelitian

BUMI DAN BAGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI

HILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 7. Lokasi Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak elakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pada Tanggal Pekanbaru

13 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan:

niversity

of Sultan

Disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hilir

Up Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Ria u

ini tanpa

mencantumkan dan menyebutkan sumber



0 llarang

_

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone 2 (0768) 22904 Faximile (0768) 21383 Tembilahan Kode Pos 29211

REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor: 070/BKBP-POLMAS/2020/04

sebagian KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Serat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : υπας Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29605 Tanggal 13 Januari 2020, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Tugas Akhir**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : HASPRILLIANTI MONICA

R NIM a : 01776201153

Program studi/Jenjang : Perpajakan / DIII

: Jl. Sederhana, Gg. P. Harapan Tembilahan Hulu **Alamat**

PAJAK DALAM WAJIB HUBUNGAN KEPATUHAN Judul Penelitian

PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P-2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Lokasi Penelitian BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 16 Januari s/d 16 April 2020.

Bemikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitan ini.

BADAN KESBANG

Tembilahan, 16 Januari 2020

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kabid Fasilitasi Penanganan Konflik,

Drs. MUHIBUDDIN, M. Si

Pembina

NEP. 19660907 199503 1 001

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.

nisim

niversi

Sultan

S



I

u

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber ...Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan Telp. (0768) 21024 - Fax. (0768) 24001 www.dlpenda.inhilkab.go.id, Email: dlpenda@inhill 7 LEMBARAN DISPOSISI Surat dari BKBP Diterima Tgl. 20/01/20 : 070/BKBP- POLMas /2020/04 No. Agenda No. Surat 42 Tgl_Surat Sifat : 16/01/20 ☐ Sangat Segera ☐ Rahasia S Hala Rekomendasi Penecitian an. Hasprillianti Monica N Ditêruskan kepada sdr. : Dengan bormat harap: Kepala Badan Pendapatan Daerah Sekretaris Tanggapan dan Saran Bid. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. Proses lebih lanjut Bid. Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi hasil. Koordinasi / konfirmasikan Bid. Penagihan dan Keberatan. Bid. Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Dan seterusnya... Einfa Apr de mal Catatan: State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria Kirago Apt di paralitasi Addi ini

© Hak cipta

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BIOGRAFI PENULIS

HASPRILLIANTI MONICA anak ketiga dari tiga beraudara merupakan putri kandung dari paangan Bapak Hastoni S.Sos dan Ibu Indesmala S.Pd. penulis dilahirkan di Kabupaten Indragiri Hilir kecamatan Tembilahan Hulu, pada tanggal 08 April 1999.

Adapun pendidikan formal yang telah di tempuh oleh penulis sebagai berikut, TK KARTIKA I-56 kemudian di lanjutkan ke

Negeri 003 Tembilahan dan lulus pada tahun 2011, semasa dibangku sekolah dasar penulis aktif dalam sanggar tari, kemudian penulis melanjutkan SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu dan lulus pada tahun 2017, semasa SMA penulis mengikuti organisasi sekolah yaitu pasus, dan organisasi di luar sekolah yang di bina langsung oleh pemeritah yaitu oraginisasi Forum Anak Inhil dan Forum Anak Riau, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Jurusan D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur Undangan Mandiri.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapngan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selama 2 bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan September Tahun 2020. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan penelitian Tugas Akhir dengan judul "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bnagunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir" Akhirnya pada tanggal 20 Mei 2020 penulis memperoleh gelar A.Md, semasa kuliah penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pajak.

of Sultan Syarif Kasim Ria